

Komparatif Studi Pembangunan Negara

Comparative Study of State Development

Song Jae Won

Universitas Nasional Jakarta
songjw02@gmail.com

TB Massa Djafar

Universitas Nasional Jakarta
tbmassadjafard@yahoo.com

Abstrak

Park Chung Hee dan Soeharto berasal dari kalangan keluarga petani sederhana yang hidup pada masa pascakolonial. Di masa pemerintahannya, kedua presiden tersebut mendasarkan kekuasaannya pada otoritas personal mereka yang tinggi. Meski terdapat kemiripan di antara keduanya, akan tetapi, hasil ekonomi-politik yang dihasilkan oleh pemerintahan mereka sangat berbeda. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan market friendly yang mendasarkan pada teori ekonomi neoklasik. Di sini tampak dengan jelas betapa Park, berhasil mengubah bentuk negara, dari negara miskin dan terbelakang menjadi negara yang “membangun” (development) --- dalam hal ini, negara yang ada adalah negara yang relatif lebih kuat terhadap masyarakat sipilnya. Negara didukung oleh kelompok militer. Sementara itu, kaum burjuasi berada pada posisi yang lemah, karena ketergantungannya pada negara. Akan tetapi, walau keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial pemerintah Orde Baru sangat mengesankan, di saat yang sama ketidakpuasan masyarakat juga makin meningkat. Meski dibungkam oleh pemerintah, namun, ketidakpuasan itu terus meningkat akibat penindasan politik yang keras dan pelanggaran berat hak asasi manusia, maraknya korupsi, penggelapan dana-dana pemerintah, dan praktik-praktik kolusi yang saling menguntungkan antara pemegang kekuasaan politik dan para kroni bisnisnya yang kebanyakan pengusaha besar keturunan etnis Tionghoa, akhirnya, menghalangi terciptanya persaingan bisnis yang sehat di dalam negeri.

Kata kunci: Otoriterian Birokrasi, Pembangunan Negara, Ekonomi Politik

Abstract

Park Chung Hee and Soeharto came from the family of simple farmers who live in the post-colonial period. In his reign, the two presidents basing their power on their personal authority is high. Although there are similarities between the two, however, the political-economic results generated by their government are very different. In this case, the author uses qualitative methods and market friendly approach that is based on neoclassical economic theory. Here appear clearly how Park, managed to change the shape of the country, from poor and backward country into a state of “building” (development) --- in this case, states that there are countries that are relatively stronger against its civil society. Countries supported by the military. Meanwhile, the bourgeoisie is in a weak position, because of its dependence on the state. However, despite the success of economic and social development of the New Order government was very impressive, at the same time also increasing public dissatisfaction. Although silenced by the government, however, discontent continued to increase as a result of political repression were hard and gross violations of human rights, rampant corruption, embezzlement of public funds, and practices of collusion of mutual benefit between political powers and cronies his business mostly large employers ethnic Chinese descent, ultimately, hinder the creation of a healthy business competition in the country.

Keywords: Authoritarian Bureaucratic State Development, Political Economy

PENDAHULUAN

Park Chung Hee dan Soeharto adalah Kepala Negara (Presiden) yang berasal dari kalangan keluarga petani sederhana pada masa pascakolonial. Kedua Presiden tersebut di masa pemerintahannya mendasarkan kekuasaannya pada otoritas personal mereka yang tinggi. Meskipun terdapat kemiripan dalam cara-cara kedua presiden menjalankan kekuasaan, tetapi hasil (*output*) ekonomi-politik yang dihasilkan oleh pemerintahan mereka sangat berbeda. Park Chung Hee relatif sukses menciptakan ekonomi modern Korea Selatan. Park menerapkan konsep Otoriter Birokratis (OB) untuk menjadikan Korea Selatan sebagai negara kaya dan memiliki kesatuan militer yang kuat. Sebaliknya, Soeharto relatif gagal membawa ekonomi Indonesia ke tingkat yang lebih modern. Walaupun pada masa-masa awal pemerintahannya, Soeharto membangun perekonomian Indonesia ke tingkat yang jauh lebih baik dibandingkan era pemerintahan sebelumnya (Soekarno), tetapi, masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menyebabkan keberhasilannya itu tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang.

Mengapa Korea Selatan bisa lebih cepat berkembang, baik dalam bidang ekonomi maupun politik, daripada Indonesia? Arief Budiman mencari jawaban dari pertanyaan tersebut melalui pendapat para wiraswasta dan birokrat yang lebih berpengalaman. Menurut Arief Budiman, Korea Selatan menggunakan keotoriteran negara untuk menumbuhkan kelompok wiraswasta yang tangguh agar roda pembangunan ekonominya terus berputar, tetapi di Indonesia, wiraswasta atau kaum borjuis yang tangguh tidak muncul. Sebaliknya, keotoriteran negara Indonesia lebih dipakai untuk memperkaya para birokrat negara, serta kelompok wiraswasta yang tergantung kepada mereka. Korea hanya butuh waktu 18 tahun di bawah rezim Park Chung Hee untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi yang luar biasa. Sementara hasil yang sama dicapai oleh Eropa setelah ratusan tahun perjuangannya. Namun, Indonesia tidak demikian, padahal Indonesia didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar

Korea Selatan dan Indonesia mengadopsi ekonomi liberal yang menekankan pada peran pasar bebas dan perusahaan swasta. Keunggulan

liberalisme adalah kemajuan lewat persaingan bebas. Untuk mengembangkan ekonomi dalam sistem liberal, negara harus membuat lingkungan persaingan. Oleh karena itu, negara perlu campur tangan di dalam pasar untuk membagikan modal dan sumber daya alam/manusia serta melindungi industri domestik dari persaingan dengan industri asing hingga industri domestik cukup kuat untuk bersaing.

Dalam rangka terselenggaranya kesempatan berusaha yang sama dan menghapus monopoli atau penguasaan atas produksi dan pemasaran barang/jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, negara memiliki kewenangan menyusun kebijakan yang diharapkan dapat mengawasi struktur, tingkah laku, dan kinerja pelaku usaha. Melalui pemerintah, negara memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu kebijakan melalui perangkat regulasi karena kunci sumber daya dari pemerintah adalah kekuatannya yang memaksa. Hal itulah yang disebut otoritarian *state developmental*. Korea Selatan adalah salah satu negara yang berhasil mencapai kemajuan ekonominya melalui kebijakan *state developmental*.

Sisi buruk dari sistem *state developmental* adalah 'pemerintahan yang kurang adil'. Ketika negara campur tangan terhadap pasar maka bahaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selalu mengancam. Walaupun mereka menerima pasar bebas liberal ketika negara campur tangan di dalam pasar, namun, para pengusaha lebih cenderung mendasarkan bisnis mereka pada hubungan otoritarian daripada persaingan di pasar. Ini membawa praktik KKN sehingga perekonomian terus tergantung kepada luar negeri.

State developmental yang dipraktikkan menyimpang dari konsepnya dan telah berperan menciptakan berbagai permasalahan krusial di Indonesia. Kolaborasi antara penguasa (birokrat negara) dengan pengusaha (elite bisnis), dalam perkembangannya justru melahirkan persekongkolan bisnis yang meminggirkan rakyat dari arena demokrasi. Akibatnya adalah tercipta kesenjangan yang semakin lebar antara orang kaya dengan orang miskin, yang pada akhirnya memicu terjadinya gejolak (termasuk konflik) sosial di berbagai daerah. Menghadapi persoalan serius ini, sebagai pemimpin Orde Baru, Soeharto

cenderung berpihak kepada pengusaha (elite bisnis), mengingat kelompok inilah yang mampu menopang bekerjanya kebijakan ekonomi politik rezim yang tengah menghadapi persoalan serius pada skala global.

Untuk membahas hal tersebut di atas, maka, penulis menggunakan metode kualitatif (Sugiyono.2010) dan pendekatan *market friendly* yang mendasarkan pada teori ekonomi neoklasik (Becker, Gary.S., 2007).

Pendekatan Berorientasi Pasar

Pendekatan berorientasi pasar disebut juga sebagai pendekatan "*market-friendly*". Teori ini mendasarkan pada teori ekonomi neoklasik yang pendekatan kebijakannya memiliki kesamaan seperti IMF dan Bank Dunia. Teori ekonomi neoklasik berasal dari gagasan Adam Smith tentang "*invisible hand*". Menurutnya, fenomena ekonomi dasar mengandung sebuah gagasan bahwa ekonomi yang paling menguntungkan secara alami akan terjadi ketika pasar dibiarkan berpartisipasi untuk terlibat dalam pertukaran barang dan jasa tanpa adanya peraturan yang mengendalikan mereka. Pendekatan berorientasi pasar menyatakan bahwa mekanisme pasar bebas diberdayakan sebagai pembentukan struktur industri kapitalistik dibandingkan dengan peran intervensi negara. Pendekatan ini juga mengandung gagasan bahwa negara harus menjamin kegiatan pasar bebas dan membatasi campur tangan pemerintah pada tingkatan yang minimal. Hal tersebut disebabkan oleh anggapan bahwa:

Ketika ekonomi akan berkembang, sumber daya alam dan perekonomian akan menemukan tempat mereka sendiri dengan cara yang paling efektif. Pendekatan berorientasi pasar tidak hanya efektif untuk fokus pada pentingnya pemasaran, tetapi juga dianggap sebagai model yang mampu menjelaskan kemungkinan koeksistensi pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata.

Sementara prestasi Asia Timur sendiri dapat dijelaskan dengan *High-Performing Asian Economies* (HPAE) yang mengacu pada kebenaran suatu penetapan "dasar-dasar" (*World Bank*, 1993). Adapun yang dimaksud sebagai

"dasar" dalam hal ini tidak lain adalah pasar. Selain itu, salah satu hal yang menjadi kunci penting dalam pembangunan Asia Timur adalah adanya upaya untuk menghentikan distorsi lebih lanjut dari pasar yang sudah tidak sempurna. Dengan upaya ini diharapkan mampu membuka jalan bagi pembangunan, dan membantu pengembangan secara bertahap terhadap fungsi alokasi sumber daya melalui pemasaran, investasi aktif perusahaan swasta, dan jaminan dari perusahaan. Oleh karena itu, penegakan kebijakan pasar fundamental sangatlah penting.

Kebijakan dari pendekatan tersebut meliputi rekonstruksi makroekonomi, privatisasi perusahaan publik, dan pemasaran bebas yang meluas secara pesat. Ketika neoliberalisme menjadi dominan setelah terjadinya pembusukan sosialisme, teori pasar percaya bahwa teori tersebut merupakan satu-satunya alternatif bagi teori pembangunan. *Washington Consensus*, yang telah menjadi strategi darurat ekonomi masyarakat setelah negara-negara sosialis berubah menjadi negara kapitalis pasar di tengah-tengah reruntuhan ekonomi yang terencana, juga berdiri atas dasar pemikiran yang sama. Masyarakat post-sosialis menegaskan bahwa reformasi ekonomi hanya dapat dicapai melalui pergeseran atau perubahan yang cepat dengan tanpa syarat atas ekonomi pasar dan menekankan pada kebijakan privatisasi keseluruhan, penghapusan sistem ekonomi terkontrol dan penerapan mekanisme pasar, serta liberalisasi perdagangan, dan strategi yang berfokus pada kegiatan ekspor yang didasarkan pada keunggulan komparatif. Bahkan, negara-negara Eropa Timur mengabaikan kondisi sejarah mereka dan menerima sepenuhnya strategi ini saat mereka masih dikacaukan dengan fakta bahwa birokrasi sosialis totaliter telah hancur.

Berdasarkan penelitian ini, peran intervensi pemerintah, melalui kebijakannya, telah mengambil bagian yang besar dalam mengembangkan ekonomi. Akan tetapi di pihak lain, sektor pengusaha swasta juga turut memainkan peran yang sangat besar, bahkan pada dasarnya mereka lebih bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi daripada pemerintah sendiri. Menurut teori *market-friendly*, hal tersebut sudah cukup bagi negara untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang tepat, seperti membangun

suasana yang kompetitif bagi perusahaan swasta, menjamin keterbukaan ekonomi untuk perdagangan internasional, dan mempromosikan stabilitas makroekonomi. Jika negara melampaui batas dengan mengambil peran yang lebih besar, hal tersebut akan lebih berbahaya daripada *market-friendly* yang tidak mendukung adanya intervensi. Pembiaran terhadap campur tangan negara juga dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dari kelompok pemerintah yang berkepentingan atas sumber daya politik, ekonomi, dan organisasi yang berlimpah. Intervensi negara dalam pasar hanya akan mendorong orang untuk mengambil keuntungan melalui peraturan pemerintah, sehingga ada peluang untuk saling suap-menyuap atau melobi di antara mereka. Alhasil, pengejaran keuntungan tidak dilakukan melalui kompetisi yang sehat.

Teori ini memperlihatkan bahwa pemerintah dalam memimpin pembangunan, telah berupaya menemukan hubungan sebab akibat antara kedua variabel melalui berbagai cara, namun, pemerintah tetap saja mengalami kesulitan. Secara tidak langsung teori ini juga menunjukkan bahwa intervensi pemerintah merupakan solusi penting untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pernyataan di atas juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia pada 1993, yang mengakui bahwa pentingnya peran negara dalam pembangunan Asia Timur yang ditandai oleh keberhasilan negara-negara tersebut mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Teori State Developmental

State developmental fokus pada alasan pemerintah lebih memilih kebijakan yang mereka anut dan kemampuan untuk mempertahankan para pendukungnya. Amsden dan Wade, menekankan peran negara dan kebijakannya seraya memberikan kritik terperinci terhadap pendekatan berorientasi pasar yang tidak dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait keberhasilan ekonomi di Korea Selatan dan Taiwan. Demikian pula analisis Johnson yang menekankan peran negara dalam kasus keberhasilan ekonomi Jepang yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pendekatan ini. Pada 1990-an, setidaknya sampai krisis keuangan Asia pada 1997, pendekatan ini telah mendominasi perdebatan di antara para

akademisi. Proposisi utamanya adalah bahwa efektivitas kebijakan industri tergantung pada:

Seperti yang telah dirancang dan dilaksanakan; realitas akan “target” industri yang dipilih sesuai dengan kemampuan negara di bidang teknologi dan kondisi pasar dunia; seberapa dekat kebijakan yang ada terintegrasi dengan strategi ekspor sehingga ada beberapa kriteria “objektif” untuk menilai kinerja perusahaan; Negara diharapkan mampu untuk mendisiplinkan penerima modal; kompetensi dan terisolasi secara politik dari birokrasi yang menerapkan kebijakan tersebut; seberapa dekat negara berinteraksi dengan sektor swasta sementara tidaklah harus menjadi beban; dan seterusnya ...

Teori pembangunan ekonomi yang diusulkan oleh Albert Hirschman merupakan penjelasan yang menekankan peran negara. Teori pembangunan ekonomi ini dapat ditempatkan dalam silsilah yang sama dengan teori dari Friedrich List dan Alexander Gerschenkron yang percaya pada pentingnya peran negara dalam industrialisasi. Gerschenkron berpendapat bahwa:

Agar kalangan masyarakat industri tertinggal dapat mengejar ketertinggalan mereka dalam bidang industrialisasi, sektor swasta harus digantikan oleh negara, karena mengingat bahwa kebutuhan dari akumulasi modal massal untuk industri padat modal dan pembangunan infrastruktur telah melampaui batas kemampuan modal swasta, seperti Jerman dan Rusia lakukan di abad 19 dan abad ke-20.

Dalam nada yang sama, teori pembangunan ekonomi berpendapat bahwa peran negara sangat penting dalam inovasi pedesaan, pendidikan publik, investasi kapital dan lain-lain, yang memerlukan suplemen untuk industrialisasi.

Para kalangan akademisi pada 1980-an menggunakan konsep *The State Centered Developmental* untuk menjelaskan karakteristik negara-negara Asia Timur yang menunjukkan kemajuan ekonomi yang pesat. Konsepsi negara developmental menolak pandangan neoklasik

tentang peran minimal negara dalam ekonomi yang dinilai akan membawa kegagalan bagi negara-negara dunia ketiga karena dengan demikian sumber daya ekonomi harus dilakukan melalui mekanisme pasar.

Argumen dasar dari teori *state-centered*, yang menempatkan konsep pembangunan negara sebagai landasannya, menyatakan bahwa negara dengan intervensi dalam skala penuh dan efektif, kebijakan industri yang ditargetkan dan pengaturan spesifik atas prinsip-prinsip tertentu untuk pencapaian standar menjadi faktor kunci dalam pembangunan Asia Timur. Teori ini menekankan peran intervensi negara sebagai koordinator utama dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi yang efektif. Hal ini juga menjelaskan bahwa peran negara sangat penting bagi negara berkembang, misalnya untuk tujuan penciptaan pasar, akumulasi modal, dan penyediaan barang-barang publik, infrastruktur, dari negara berkembang.

Negara mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengatur sistem keuangan dan pergerakan modal. Hal ini juga membawa pada hubungan timbal balik antara intervensi negara dalam industri dan struktur harga dengan ekonomi dunia. Negara dikatakan penting dalam segala hal, termasuk dalam hal diversifikasi perkembangan dan kemandirian mekanisme pertumbuhan. Di Korea misalnya, pemerintah menjalankan keputusan investasi penting mengenai pendistribusian sumber daya dan mengoperasikan kegiatan ekonomi perusahaan swasta yang tidak melalui mekanisme pasar.

Amsden yang merupakan seorang ahli Amerika yang menekuni perkembangan pembangunan Korea, menyatakan bahwa:

Negara Asia Timur harus lebih berhati-hati membuka pasar bebas karena ketidaksiapan infrastruktur menghadapi persaingan adalah menjadi konsekuensinya. Hal ini bertentangan dengan kebaikan ide-ide neoklasik tentang pembangunan negara. Dalam hal ini, intervensi untuk fokus pada pembangunan infrastruktur kebijakan tersebut sesuai jika digunakan untuk menjelaskan kondisi negara-negara berkembang.

Wade mengajukan Taiwan sebagai contoh

yang tidak keberatan terhadap klaim dari para ekonom neoklasik. Dia mengusulkan bahwa pembangunan Taiwan ini seharusnya didahului dengan pembangunan infrastruktur dan setelah itu mengatur pasar bebas bukan hanya mengikutinya.

Amsden menjelaskan fenomena tersebut bahwa:

Jika kita melihat kenyataan, sulit untuk mengabaikan peran negara dari fenomena yang terjadi di kawasan Asia Timur. Bank Dunia yang menyarankan penerapan kebijakan di negara-negara Asia Timur yang berkembang tanpa mempertimbangkan kebijakan praktis mereka. Ini akan menjadi sangat bertentangan dan dapat menimbulkan klaim pada “kiblat kebijakan industri dunia”, yang juga merupakan usulan kebijakan Bank Dunia yang sangat tidak praktis.

Model *state-centered* C. Johnson, yang telah digunakan Jepang untuk menjelaskan kasus Asia Timur, telah menunjukkan bahwa peran aktif negara adalah faktor penting dalam menghidupkan kembali pasar dari negara yang gagal dalam pembangunannya. Amsden menambahkan bahwa peran negara sangat penting untuk mendorong pasar, sebab intervensi aktif negara dalam hal demikian merupakan variabel yang independen dalam pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, ia menyoroti dan menilai bahwa makna independen dari peran intervensi negara yaitu hal tersebut merupakan faktor umum dalam menjelaskan keunikan fenomena dunia yang dikenal sebagai akhir dari kapitalisme. Fenomena pembangunan dunia saat ini menjelaskan lebih lanjut bahwa Korea Selatan memiliki pola pembangunan yang secara fundamental berbeda dari pola yang diterapkan oleh Inggris dengan industrialisasi *laissez-faire*-nya atau dari pola abad ke-19 yang ditetapkan oleh AS dan Jerman. Ia mengatakan bahwa:

Korea Selatan merupakan kasus yang terisolasi. Secara pembangunan ekonomi, lembaga-lembaga ekonomi dan prosedur industri Korea berbeda dengan AS dan Jerman. Kategori dan karakter institusional Korea berbeda dengan model pasar yang ada di AS dan Jerman. Proses pembangunan ekonomi yang merupakan

paradigma baru. Inti dari paradigma baru ini adalah negara menjadi kuat dan otonom serta cukup mampu untuk menggabungkan dan memodifikasi pengembangan sumber daya ekonomi sosial, memutuskan dan mendukung tujuan pencapaian bidang-bidang yang diprioritaskan, serta menyusun strategi yang efektif untuk mengatasi hambata-hambatan kemajuan dalam pembangunan.

Teori *state developmental* menyatakan bahwa intervensi negara secara efektif merupakan kunci dari pembangunan Asia Timur, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hanya intervensi negara yang mencerminkan kemerdekaan negara dan otonomi masyarakat. Senada dengan hal tersebut, teori *state developmental* merupakan hasil dari pendekatan "*State-Centered*". Pendekatan *State-Centered* memiliki penjelasan paling persuasif mengenai pembangunan ekonomi Asia Timur dibandingkan dengan teori yang lain. Pendekatan ini, menggambarkan pertumbuhan Korea Selatan dan Taiwan, dua negara yang dianggap sebagai model pembanguan utama Asia Timur. Kemajuan Indonesia juga dapat dijelaskan dengan hasil yang lain. Meskipun pasar dan aspek budaya memang juga turut berkontribusi dalam pembangunan, tetapi berdasarkan fakta perkembangan ekonomi ditentukan oleh kesediaan seluruh sumber daya, yang dalam hal ini memang tidak boleh diabaikan.

Ciri utama dari sistem keadaan negara berkembang dengan negara kapitalis adalah negara yang berorientasi pasar. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap sifat individu dan perusahaan swasta, kemudian adanya campur tangan dan pengelolaan terhadap perekonomian negara, kedua hal tersebut pada saat yang bersamaan juga merupakan unsur lain yang sangat penting untuk diperhatikan. Pada titik ini, negara harus campur tangan dalam perekonomian negara dengan tujuan yang spesifik, seperti pengembangan produksi dan peningkatan persaingan, sebab pada saat itu unsur-unsur tersebut dianggap lebih penting dibandingkan dengan penciptaan kesetaraan atau distribusi yang adil.

Negara juga harus bebas dari tekanan sosial

dan politik, dan pada saat yang sama juga harus memiliki birokrasi yang efektif. Dengan kata lain, kepemilikan otonomi dan birokrasi yang efektif merupakan salah satu aspek yang paling penting dari kelembagaan negara, dan juga merupakan kunci untuk mencapai pembangunan, yang menjadi tujuan negara. Selain itu, untuk mencapai tujuan negara diperlukan sistem pembangunan yang tidak luas atau bersifat lebih rinci yang memungkinkan hubungan kerja sama yang erat antara birokrasi negara dan ekonomi swasta. Sebagai hasilnya, perusahaan swasta yang memiliki lokasi strategis dalam perekonomian negara dapat dimobilisasi secara efektif untuk mencapai tujuan negara. Memang terdapat berbagai teori dalam pembangunan negara, tetapi otonomi dan intervensi negara merupakan salah satu unsur yang penting untuk keberhasilan pembangunan ekonomi. Mereka mengatakan bahwa faktor kunci bagi pembangunan ekonomi Korea Selatan adalah pengadopsian sistem pembangunan negara dalam kapitalistik terbatas yang menekankan pada motif sukarela pribadi. Hal tersebut juga menjadi kebijakan pembangunan ekonomi dan industri yang diterapkan Park Chung Hee.

Menurut Chang Ha Won, ada beberapa penafsiran tentang kebijakan untuk mencapai keberhasilan ekonomi Korea, beberapa di antaranya adalah kebijakan nasionalisasi Bank, penyaluran kredit, kebijakan nilai tukar, kebijakan tenaga kerja, kebijakan substitusi impor, dan kebijakan berorientasi ekspor. Lee Byeong Cheon memfokuskan pada kombinasi dari kebijakan substitusi impor dan kebijakan berorientasi ekspor, skala ekonomi, mendukung *cheabol*, dan lain sebagainya. Sementara tafsir yang terakhir, yakni dari Chang Ha Joon menyatakan bahwa penyesuaian rencana investasi yang kompetitif, promosi skala ekonomi dan perubahan struktural yang dilakukan melalui kebijakan industri protektif menjadi faktor pendorong bagi pencapaian keberhasilan Korea.

Banyak sarjana menggambarkan rezim Park Chung Hee sebagai negara *state developmental*. Hal ini terbukti dalam sejarah perkembangan ekonomi di bawah otoritarianisme pada zaman Park Chung Hee, otonomi negara Korea Selatan ditentukan oleh mereka yang berkuasa dan memiliki kemampuan yang sistematis untuk mengatur

dan mempromosikan pembangunan. Di bawah prinsip kebijakan dan sistem *state developmental*, negara mengintervensi pasar melalui kebijakan industri perspektif dalam jangka panjang, untuk meraih keuntungan dan mencapai industrialisasi. Kebijakan dan sistem yang khusus dapat dijadikan sebagai petunjuk mengenai prioritas industri, peraturan tentang persaingan harga yang berlebihan, selektif proteksionisme, kebijakan subsidi, dan lain sebagainya.

Administrasi Park Chung Hee dianggap sebagai titik awal munculnya perkembangan kediktatoran di Korea. Sama halnya dengan kediktatoran pada zaman Soeharto di Indonesia, kediktatoran pembangunan yang muncul pada masa itu dijadikan sebagai moto dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi, pada hakikatnya, tujuan utama yang hendak dicapai adalah untuk mengejar kekuasaan politik. Jika melihat dari segi latar belakang sejarah dan struktur pemerintahan pada rezim Soeharto, hal tersebut sangat identik dengan rezim pemerintahan yang dijalankan Park Chung Hee, karena, keduanya menggambarkan sebuah kediktatoran pembangunan. Sampai sekarang, dapat dikatakan bahwa petunjuk terbaik untuk menjawab pertanyaan bagaimana pembangunan kediktatoran dapat bekerja dengan sukses terletak pada teori pembangunan negara.

Soeharto menetapkan moto pembangunan ekonomi untuk mendapatkan kekuasaan. Herbert Feith mendefinisikan rezim Orde Baru sebagai rezim kediktatoran pembangunan untuk tujuan pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar penelitian yang berhubungan dengan rezim Orde Baru memandang negara ini dari sudut pandang yang berorientasi pada negara. Sudut pandang ini berasal dari analisis negara-negara berkembang seperti Amerika Latin. Namun, teori-teori ini tidak cukup untuk menjelaskan karakter rezim Soeharto selama 32 tahun.

Karl D. Jackson dan Lucian Pye (1978), menyebut rezim Soeharto di Indonesia sebagai negara otoritarian birokrasi, yakni hampir seluruh sistem politik dengan kekuasaan dan partisipasi untuk pengambilan keputusan nasional terbatas hanya kepada pejabat negara, khususnya korps perwira militer dan birokrat tingkat tinggi, termasuk spesialis yang sangat terlatih atau yang dikenal sebagai teknokrat. Selama rezim Orde

Baru, birokrasi pemerintah Indonesia sering dijalankan sebagai birokrasi politik untuk kepentingan Soeharto.

Otoriterisme Birokrasi

Sebagian besar negara-negara industri baru telah melalui penderitaan yang diakibatkan oleh rezim militer terdahulu, sebelum akhirnya mampu menikmati hasil dari modernisasi dan demokrasi (misalnya, Brasil, Argentina, Uruguay, dan Chili) dengan melihat pada kemunculan rezim militer di negara-negara tersebut selama kurun waktu 1964-1973. Hal Ini membuat para ilmuwan tertarik untuk mempelajari efek industrialisasi terhadap politik. Guillermo O'Donnell mengajukan teori Otoriterisme Birokrasi untuk menjelaskan gejala otoritarianisme baru dalam negara industri baru. Otoriterisme birokrasi merupakan istilah yang terbentuk dari Sistem Birokrasi dan Otoriterisme. Dengan demikian, otoriterisme birokrasi mengandung pengertian sebagai sebuah otoritarianisme yang sebagian besar kebijakannya dibuat oleh teknokrat.

Terdapat dua titik fokus ketika melihat sosial-ekonomi modernisasi dan perubahan politik. Salah satunya adalah modernisasi teori yang menggambarkan paradigma optimis. Teori ini mengatakan bahwa perkembangan sosial-ekonomi akan menjamin sistem yang mampu menciptakan sistem keamanan demokrasi. Paradigma yang kedua adalah paradigma pesimis. Ini menegaskan bahwa modernisasi mudah mengundang aktivis politik yang menjadi penyebab munculnya kecacauan sosial dan berbagai masalah ekonomi. Karena pada saat itu negara ketiga dalam proses memasuki kapitalisme dunia, mereka akan mengalami kehilangan kemandirian dan kebebasan, ini disebut teori ketergantungan. Hal itu disebabkan mereka perlu modal dan teknologi asing, dan ketika mereka telah menerima itu semua muncullah koneksi dan modal politik. Hal itu menyebabkan politik negara menjadi lebih kacau. Kegelisahan ini adalah akibat dari otoritarianisme.

Teori O'Donnell tentang Otoriterisme Birokrasi merupakan bagian dari pesimisme. Teori tersebut mengambil sudut pandang yang berbeda dari teori modernisasi lainnya dan berfokus pada struktur pemerintahan, komposisi kelas, pembentukan penguasa dan analisis kebijakan

publik. Teori tersebut juga mengandung gagasan bahwa terdapat hubungan yang erat antara perubahan sosial-ekonomi dan sistem politik, membuat teori tersebut memuat cukup banyak sejarah-materialis. Namun, otoriterisme birokrasinya telah sangat dipengaruhi oleh Weberianisme karena teori tersebut juga menyatakan bahwa modernisasi dan otoritarianisme memiliki *selective affinity*. Teori otoriterisme birokrasi menegaskan peran para teknokrat dalam perubahan politik. Hal ini yang membedakan gagasannya dari teori modernisasi lainnya dengan menyatakan bahwa negara-negara industri baru memiliki kecenderungan untuk menghasilkan otoritarianisme dalam proses industrialisasi mereka.

Dalam penelitian ini, teori Otoriterisme Birokrasi O'Donnell diadopsi untuk menjelaskan peran pemerintahan Park Chung Hee dan Soeharto dalam mengatasi krisis industrialisasi. Menurut O'Donnell, otoriterisme birokrasi muncul dari interkoneksi dialektika utama dari tiga sisi perubahan sosial-ekonomi (industrialisasi, vitalitas sektor masyarakat, peran teknokrat) dan tiga sisi perubahan sistem politik (struktur pemerintahan, koalisi kelas penguasa, kebijakan umum). Unsur-unsur ini saling berhubungan untuk membentuk suatu sistem politik, birokrasi dan otoritarianisme. Sistem politik muncul dalam tiga bentuk yang salah satunya adalah sistem oligarki konvensional. Di negara-negara Amerika Latin, komoditas ekspor mineral dan pertanian telah menjadi sektor yang dimanfaatkan elite politik untuk memerintah negara mereka sendiri. Hal ini, pada gilirannya telah membuat kebijakan umum yang terbentuk memiliki kecenderungan pada pemikiran para elite tersebut. Sektor rakyat belum diaktifkan dan kompetisi politik dibatasi sehingga mendorong kelas penguasa untuk disalahkan. Setelah itu muncul Sistem Kerakyatan. Transisi dari oligarki menuju Sistem Kerakyatan berkaitan erat dengan tahap industrialisasi awal dalam memproduksi barang-barang konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Kerakyatan telah berakar dalam aliansi politik antara elite industri dan rakyat (kelas bawah menengah dan rendah). Pemerintah memakai nasionalisme dan industrialisasi untuk memobilisasi rakyat. Sifat ini terbentuk secara alami ketika pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan kebijakan langsung atau tidak

langsung yang juga memperluas pasar domestik dan mempromosikan industri.

Sistem yang populer mencoba untuk mempertahankan sistem politik yang demokratis dan kompeten, yang kurang lebih sesuai dengan negara yang dipimpin. Dengan ini, O'Donnell mengatakan bahwa:

Melalui modernisasi industri, sistem politik akan menjadi lebih terbuka dan bersifat kompetitif. Setelah industrialisasi, kekuatan politik rakyat menjadi terakumulasi secara kuat dan mereka mengeluarkan tantangan untuk kebijakan ekonomi konvensional seperti stabilisasi harga barang-barang dan kebijakan menjaga upah minimum. Tuntutan tersebut menyebabkan kekacauan sosial, seperti pemogokan buruh dan demonstrasi mahasiswa. Selanjutnya sistem partai politik juga akan mengalami kekacauan dan menghadapi krisis. Pada akhir era perkembangan industri, birokrasi otoriterisme muncul dengan karakteristik yang memperlihatkan bahwa pasar domestik telah memenuhi produk konsumen dan hanya terdapat sedikit peluang bisnis, sementara krisis neraca pembayaran diikuti oleh impor barang modal dan perantara. Pada saat ini, perekonomian domestik mencoba untuk menemukan *soft landing* untuk mencapai *zero-sum*, yang pada gilirannya akan memengaruhi keruntuhan aliansi multikelas.

Dalam keadaan ini, birokrat harus mampu membuat kebijakan untuk mengembangkan ekonomi secara lebih cermat dan konvensional, sementara di sisi lain mengabaikan redistribusi untuk publik. Para elite politik mencoba untuk menyarankan solusi atas kebuntuan ini dengan pendalaman industrialisasi melalui peningkatan produksi barang untuk diekspor dan perolehan modal perantara. Restrukturisasi industri yang membutuhkan teknologi industri tingkat tinggi, modal asing, dan bisnis canggih dapat diperoleh dari perusahaan multinasional dan perusahaan keuangan internasional. Dalam rangka mendapatkan dukungan dari sektor asing,

pemerintah harus menerima kondisi kebijakan ekonomi liberal yang disarankan oleh pemberi pinjaman. Hal ini, sudah barang tentu membuat pemerintah terisolasi dari rakyat yang pada akhirnya akan membuat pemerintah cenderung lebih mementingkan pembangunan ekonomi ketimbang memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan membawa pada krisis politik.

Salahsatu gambaran utama dari Otoriterisme Birokrasi adalah peran teknokrat tumbuh seiring dengan berjalannya proses pembangunan. Para teknokrat tersebut membentuk Koalisi Kudeta untuk mengakhiri krisis dan menggantinya dengan sistem yang mereka kehendaki. Profesionalisme baru militer menemukan jalan untuk terlibat dalam 'Koalisi Kudeta' dan masuk ke dalam dunia politik. O'Donnell mengatakan; sebagian besar negara industri baru menghadapi proses struktural dan hal itu menjadi alasan utama untuk membangun Otoriterisme Birokrasi. Ia mengambil kondisi Brasil pada 1964, Argentina 1966, dan Chili serta Uruguay di 1973, sebagai contoh dari proses struktural otoriterisme birokratis. Otoritarianisme birokrasi mencoba untuk mengontrol aktivitas politik rakyat secara ketat meskipun tingkat pengontrolan itu bervariasi dari satu negara ke negara lainnya sesuai dengan keadaan atau latar belakang historisnya. Sejatinya, teori O'Donnell dapat diringkas sebagai berikut: Otoriterisme birokrasi merupakan batu loncatan penting dalam jalan menuju industrialisasi untuk mengatasi Industri Substitusi Impor (ISI).

Pada akhirnya, karakter khusus Otoriterisme Birokrasi yang dikemukakan O'Donnell dapat diringkas sebagai berikut:

1. Otoriterisme Birokrasi sangat bersifat oligopoli. Hal tersebut menjamin struktur kelas yang dikendalikan oleh sejumlah kecil borjuis, militer, dan teknokrat.
2. Otoriterisme Birokrasi terdiri atas para ahli yang mendorong pejabat untuk memiliki inisiatif dalam membuat kebijakan dan mereka yang mencoba bekerja untuk menormalisasi ekonomi.
3. Sistem Otoriterisme Birokrasi mencoba untuk meniadakan sektor politik rakyat.
4. Dan itu tidak termasuk sektor ekonomi rakyat.
5. Pada waktunya, hal ini akan menekan hak-

hak warga negara dan masyarakat.

6. Denasionalisasi struktur produksi dan meningkatkan produksi.
7. Sistem Otoriterisme Birokrasi akan mendepolitisasi masalah sosial dalam negeri.
8. Pada tahap awal, Otoriterisme Birokrasi memiliki kecenderungan untuk menolak kemungkinan bagi orang untuk mengambil keuntungan atas kepentingan sendiri.

Semua negara tidak dapat mengambil proses yang sama dalam hal Otoriterisme Birokrasi. Itulah sebabnya mengapa O'Donnell menginginkan beberapa hal berikut untuk dipertimbangkan sebagai model teoritis yang harus diterapkan. *Pertama*, setiap negara memiliki konteks modernisasi yang berbeda. *Kedua*, sumber daya ekonomi dan politik juga berbeda pada tiap-tiap negara. *Ketiga*, para pemimpin politik harus memiliki cara sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi negara industri baru.

Simpulan

Seperti kebanyakan negara-negara Asia Timur lainnya, pesatnya pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan di bawah rezim Park Chung Hee dan Indonesia di bawah rezim Soeharto itu berlangsung di bawah iklim pemerintahan yang sangat terpusat, otoriter, dan represif. Para pemimpin negara-negara otoriter sering membela pemerintahannya dengan menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak mungkin berlangsung dalam iklim demokratis yang kacau. Mereka menyatakan, partai-partai politik umumnya sibuk saling cekcok dan hanya memikirkan kepentingan politik mereka sendiri dan tidak memikirkan kepentingan nasional.

Park Chung Hee dan Soeharto memiliki cara yang berbeda dalam pembangunan ekonomi di negaranya. Sebagai bagian dari pendanaan pembangunan ekonomi, Park Chung Hee mendapatkannya dengan cara mengakuisisi properti Jepang sebagai properti Korea ditambah pinjaman usaha melalui normalisasi hubungan diplomatik antara Korea dan Jepang pada 1965. Meski banyak mendapat perlawanan dari rakyat, kenyataannya, normalisasi hubungan Korea dengan Jepang telah membawa perekonomian negara Korea Selatan ke dalam kisaran kapitalisme dunia. Normalisasi

hubungan Korea-Jepang dan pengiriman pasukan Korea ke Perang Vietnam merupakan dua cara yang unik dalam mengembangkan ekonomi negara.

Di sisi lain, seperti telah disebutkan, Soeharto memiliki cara sendiri untuk menangani dana pembangunan ekonomi di dalam negerinya. Sejak berakhirnya perang dingin yang panjang, negara Barat cukup tertarik pada Indonesia, bahkan mendirikan IGGI, sebuah dewan pengelola bantuan asing bagi Indonesia yang dibentuk guna membantu pembangunan ekonomi Indonesia selama era Soeharto. Dilihat dari konteks seperti ini, Indonesia sebenarnya jauh lebih mudah memperoleh modal pembangunan daripada Korea Selatan. Oleh karena itu, awal proses pembangunan Korea Selatan dan Indonesia dimulai dengan *mindset* berbeda.

Pemerintah Park adalah pemerintah militer, yang berkoalisi dengan teknokrat ekonomi. Pemerintah ini berhasil membangun sebuah birokrasi pemerintahan yang relatif bersih, dan sebuah kelas industriawan yang efisien. Pada 1960-an, pemerintah Korea memutuskan untuk membentuk birokrasi meritokrasi, yang akhirnya dilembagakan pada awal 1970-an. Sejak saat itu, birokrat karir menduduki posisi penting dalam pemerintah. Oleh sebab itu, presiden dapat dengan sepenuhnya mengandalkan kemampuan para birokrat ini.

Di sisi lain, pembangunan industri strategis pada awal Orde Baru, tidak terlepas dari peran teknokrat yang sering disebut *Mafia Berkeley*. Ekonomi Indonesia yang maju pesat di masa Orde Baru adalah berkat kemampuan para teknokrat ekonomi dalam menjaga kestabilan makroekonomi. Tetapi, para teknokrat tersebut tidak memiliki cukup banyak pengikut dalam negara, dan lebih tertarik untuk mewujudkan misi tipe ideal negara kapitalis yang direpresentasikan sebagai liberalisasi ekonomi, dan pengenalan modal asing. Soeharto dan teknokratnya membuat hubungan patronasi khusus dengan dunia bisnis. Oleh karena itu, mereka bisa dikatakan lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan negara.

Pemerintah Park, dengan perkataan lain, berhasil mengubah bentuk negara, dari negara miskin dan terbelakang menjadi negara yang

“membangun” (*development*). Perubahan ini dilakukan dari atas, yaitu oleh negara. Kelompok pengusaha yang profesional mulai diberi kesempatan untuk tumbuh. Pada saat yang sama, pejabat tinggi negara yang memperkaya diri melalui sistem rente, mulai dibersihkan. Dengan perkataan lain, upaya-upaya pembaharuan benar-benar datang dari atas, dari negara sendiri. Negara melakukan tindakan untuk mengubah dirinya. Hal ini dimungkinkan karena dua hal. *Pertama*, negara di bawah Park merupakan negara yang dapat menguasai masyarakat sipilnya. Negara yang ada adalah negara yang relatif lebih kuat terhadap masyarakat sipilnya. Negara didukung oleh kelompok militer. Sementara itu, kaum burjuasi berada pada posisi yang lemah, karena ketergantungannya pada negara. Kelompok-kelompok lain yang ada di masyarakat, seperti kelompok mahasiswa, kelompok buruh dan juga kelompok tani di pedesaan, praktis tidak berdaya menghadapi kekuatan militer. *Kedua*, ada motivasi yang kuat dari Presiden Park mensukseskan pembangunan ekonomi untuk menarik dukungan dari AS. Tanpa dukungan dari negara adikuasa ini, yang sejak semula memiliki peran sangat penting dalam melahirkan negara ini, sulit bagi Park untuk bertahan. Padahal, pemerintah AS pada mulanya tidak menyukai munculnya Park sebagai pemimpin Korea Selatan melalui kudeta militer. Park bekerja keras membangun perekonomian Korea Selatan antara lain dengan membersihkan birokrasi negara dan melaksanakan rencana pembangunan ekonomi secara sungguh-sungguh dan penuh disiplin. Setelah melihat kesungguhan ini, AS yang memang punya kepentingan untuk melihat Korea Selatan berhasil dalam pembangunan ekonominya sehingga mampu menghadapi Korea Utara, mulai membantunya.

Walaupun keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial Pemerintah Orde Baru sangat mengesankan, di saat yang sama ketidakpuasan masyarakat juga makin meningkat. Meski dibungkam oleh pemerintah, tetapi ketidakpuasan akibat penindasan politik yang keras dan pelanggaran berat hak asasi manusia, maraknya korupsi, penggelapan dana-dana pemerintah, dan praktik-praktik kolusi yang saling menguntungkan antara pemegang kekuasaan politik dan para kroni bisnisnya yang makin meningkat, akhirnya

menghalangi terciptanya persaingan bisnis yang sehat di dalam negeri. Di antara para kroni tersebut kebanyakan adalah pengusaha besar keturunan etnis Tionghoa.

KKN sangat merusak moral masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah Soeharto. Pertumbuhan ekonomi, terutama selama masa akhir Orde Baru, telah menciptakan kesenjangan pendapatan. Kondisi ini melahirkan pandangan yang dianut banyak orang tentang “melebarnya jurang ekonomi” antara orang Indonesia yang kaya dan yang miskin serta antara pribumi dan nonpribumi. Jurang ekonomi yang semakin lebar antara segelintir orang yang amat kaya dan kuat secara politik serta mayoritas penduduk miskin yang tak berdaya, praktis mengikis kohesi sosial yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik dan pembangunan nasional. Masyarakat, yang semakin tergantung hanya pada satu lembaga yang kuat tetapi tidak berkelanjutan, yaitu Presiden Soeharto, terbukti sangat rapuh ketika lembaga tersebut oleng akibat krisis ekonomi Asia. Pada akhirnya, lemahnya pembangunan kelembagaan di bawah Orde Baru dan timbulnya berbagai pelanggaran telah menggerogoti kemampuan dan keabsahan politik rezim ini. Semua itu mengakibatkan ambruknya Pemerintah Orde Baru pada 1998, menyusul krisis ekonomi Asia.

Kepustakaan

- Adams, C. 2011. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (terj, Syamsu Hadi). Yogyakarta: Media Pressindo.
- Amsden Afice, Wade Robert. 1989. *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. New York: Oxford University Press.
- Baeg, Im Hyung. 2004. “Historical Origins of Yushin: Park Chung Hee's Machiavellian Moment” dalam *Journal of Korean Politics*, Vol 13, No 2.
- Bawazier, Taufik. 2011. “Politik Teknokrat di Indonesia: Dinamika Ekonom, Teknolog dan Pembangunan Industri Strategis” dalam *Disertasi Universitas Indonesia*, 2011.
- Becker, Gary.S., 2007. *Economic Theory*. New Jersey:Transaction Publishers
- Castles Lance. Feith Herbert (ed) 1988. *Pemikiran politik Indonesia 1945-1965* Jakarta : LP3ES
- Cheon, Lee Byeong (ed.). 2006. *Developmental Dictatorship and the Park Chung Hee Era: The Shaping of Modernity in the Republic of Korea*. Paramus: Homa & Sekey Books.
- Croft, Hutch. 2009. *Divergent Dictators: Legacies of Leadership in Three Asian Authoritarian Regimes*. Korea Institute, The Australian National University Institute of East and West Studies, Yonsei University.
- Daniel Dhakidae, 2003, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Easter, David. 2005. “Keep the Indonesian Pot Boiling: Western Intervention in Indonesia, October 1965-March 1966” dalam *Cold War History*, Volume 5, Number 1, February.
- Hyung A, Kim. 2004. *Korea's Development Under Park Chung Hee*. London and New York: Routledge Curzon.
- Kook, Kim Byung dan Ezra F Vogel. 2011. *The Park Chung Hee Era: The Transformation of South Korea*. Cambridge: Harvard University Press.
- Lustick, Ian S. and Britt Cartrite. 2005. “Virtualstan: An Agent-Based Modeling Strategy for the Comparative Dynamics of Authoritarian Regimes: Bureaucratic Authoritarianism, Bureaucratic Feudalism, and Neopatrimonialism” dalam Paper presented at the meeting of the American Political Science Association, Washington, DC.

- Maswadi Rauf, 2006, Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Antara Kenyataan dan Harapan. Akbar Tandjung Institute. Jurnal Politik. Vol. 2. No. 2.
- Moh. Mahfud M.D, 2001, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta; Rineka Cipta.
- Muchamad Ali Safaat, 2009, Pembubaran Partai Politik di Indonesia, Disertai UI, Jakarta.
- Sari, Dewi Ambar. 2006. Beribu Alasan Kita Mencintai Pak Harto. Jakarta: Jakarta Citra.
- Stepan, Alfred. 1996. Militer dan Demokratisasi; Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Lain, Grafiti; Jakarta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sup, Han Yong. 2011. The May Sixteenth Military Coup, The Park Chung Hee Era: The Transformation of South Korea. Cambridge: Harvard University Press.
- Sup, Lee Man. 2009. 5.16 Koa 10.26: Park Chung Hee, Kim Jae Kyu Gerigo Na. Seoul: Nanam.
- Widjojo, Nitisastro. 2010. Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
Universitas Nasional